



## Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Adrian Kurnia Sobana Putra<sup>1\*</sup>, Yusuf Vedi Velandi<sup>2</sup>, Rangga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

\*Email : <sup>1\*</sup>[kurniaadrian01@gmail.com](mailto:kurniaadrian01@gmail.com), <sup>2</sup>[yusufvelandi@gmail.com](mailto:yusufvelandi@gmail.com), <sup>3</sup>[ranggaakun25@gmail.com](mailto:ranggaakun25@gmail.com)

Alamat Kampus: Jl. Raya Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau  
Korespondensi penulis: [kurniaadrian01@gmail.com](mailto:kurniaadrian01@gmail.com)

**Abstract.** *Political economic analysis in handling economic inequality in Indonesia reveals that although the Gini Ratio shows a decline, economic inequality remains a serious issue. Inequality is seen from the uneven distribution of income, access to education, and economic opportunities. The purpose of this study is to analyze the role of political economy in handling economic inequality and to open up policies that have been implemented in Indonesia. The research method used is qualitative research with a descriptive analytical approach. The government has launched various policies such as social assistance and infrastructure development, but implementation challenges such as resources, corruption, and lack of coordination between institutions still hamper the effectiveness of these policies.*

**Keywords:** *Political Economy, Economic Inequality, Gini Ratio*

**Abstrak.** Analisis politik ekonomi dalam penanganan ketimpangan perekonomian di Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun Gini Ratio menunjukkan penurunan, ketimpangan ekonomi tetap menjadi isu serius. Ketimpangan terlihat dari distribusi pendapatan yang tidak merata, akses pendidikan, dan peluang ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran ekonomi politik dalam penanganan ketimpangan ekonomi serta membuka kebijakan yang telah diimplementasikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, namun tantangan implementasi seperti sumber daya, korupsi, dan kurang koordinasi antar lembaga masih menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

**Kata kunci:** Ekonomi Politik, Ketimpangan Ekonomi, Rasio Gini

### 1. LATAR BELAKANG

Proses pembangunan nasional di Indonesia hingga saat ini masih banyak menghadapi tantangan, salah satunya adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ini tercermin dari distribusi pendapatan dan pengeluaran yang tidak merata antar kelompok masyarakat dan antarwilayah. Ketimpangan ini pun juga bisa dilihat dalam akses lapangan kerja, pendidikan, dan sumber daya ekonomi lainnya. Salah satu indikator yang sangat umum digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan adalah Gini Ratio. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada Maret tahun 2024 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia setelah diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,379. Dengan adanya angka tersebut, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Maret 2023 yaitu sebesar 0,388 dan merupakan angka terendah sepanjang periode tahun 2017-2024. Penurunan

ini mengindikasikan adanya perbaikan dan pemerataan pengeluaran penduduk secara nasional (BPS, 2024).

Ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan masih signifikan. Pada Maret 2023, Gini Ratio di perkotaan adalah 0,399, turun dari 0,409 pada tahun sebelumnya, sementara di pedesaan menjadi 0,306, turun dari 0,313. Data tersebut menunjukkan ketimpangan di perkotaan lebih tinggi. Menggunakan distribusi pengeluaran, pada Maret 2024 40% penduduk terbawah menguasai 18,40% total pengeluaran nasional dengan 17,41 di perkotaan dan 21,39% di pedesaan menunjukkan ketimpangan yang lebih besar di perkotaan. Ketimpangan juga bervariasi antarprovinsi, Rasio Gini tertinggi pada Maret 2024 tercatat di Yogyakarta (0,435), DKI Jakarta (0,423), dan Jawa Barat (0,421), sedangkan terendah ada di Kepulauan Bangka Belitung (0,244). Fluktuasi ketimpangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemic Covid-19 yang meningkatkan Gini Ratio pada tahun 2020, setelah pandemi, kebijakan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif meskipun masih terdapat kendala dalam pengimplementasiannya (BPS, 2024).

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia ini dapat memberikan banyak dampak negatif seperti sebagian besar populasi memiliki daya beli yang rendah, dengan diikuti pendapatan yang juga minimal, kemudian menyebabkan penurunan konsumsi, menghambat permintaan terhadap barang dan jasa, hingga pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Atiza, 2024). Ketimpangan ekonomi akan terjadi karena beberapa faktor-faktor penyebab seperti ketimpangan pendapatan, kesenjangan akses dalam mendapatkan pendidikan, atau kesenjangan dalam pemenuhan sumber daya ekonomi (Gunung, Setiawan, & Yasin, 2023).

Dalam penanganannya ekonomi politik memiliki peran yang tidak bisa dilepaskan, kebijakan publik dan distribusi sumber daya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kekuatan ekonomi. Pemerintah Indonesia sendiri sudah merancang beberapa program dan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan seperti bantuan sosial dan pendidikan, namun efektivitasnya masih menghadapi banyak tantangan.

Mengingat ketimpangan ekonomi yang masih terus berlanjut dan dampak sosial serta ekonominya yang semakin luas, penting untuk menganalisis bagaimana ekonomi politik ini memberikan perannya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanganan ketimpangan di Indonesia. Dengan melakukan analisis akan membantu mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam upaya pemerintah untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil dan merata.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Ekonomi Politik**

Ekonomi politik merupakan salah satu bidang studi yang isinya mempelajari interaksi antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi politik, keduanya memiliki hubungan sistem yang saling terkait, dimana sebuah kebijakan politik dapat memberikan pengaruh terhadap struktur ekonomi ataupun sebaliknya. Perkembangan ekonomi politik dimulai ketika abada ke-18 dan muncul pemikiran dari beberapa filsuf seperti Adam Smith dan David Ricardo. Kemudian pada abad ke-20, ekonomi politik ini berkembang menjadi 2 aliran utama yaitu ekonomi politik kiri dan kanan. Perbedaan keduanya adalah, ekonomi politik kiri dipengaruhi oleh pemikiran dari Karl Marx yang memberikan penekanan pada kontrol sosial atas sumber daya ekonomi dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, sedangkan ekonomi politik kanan dipengaruhi oleh pemikiran liberal serta konservatif yang berarti memberikan penekanan pada pentingnya pasar bebas, kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi dan minimnya campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Lalu, pada era globalisasi saat ini, peran politik ekonomi menjadi semakin penting dalam merancang kebijakan perdagangan dan investasi internasional, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan (Fai, 2024).

### **Ketimpangan Ekonomi di Indonesia**

Ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah masalah serius yang menghambat pemerataan hasil pembangunan. Meski pertumbuhan ekonomi cukup pesat, manfaatnya belum banyak dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Ketimpangan ini tampak dari perbedaan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan serta kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Padahal, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang menjunjung asas kekeluargaan, keadilan sosial, dan pemerataan, namun implementasinya belum optimal, terlihat dari distribusi pembangunan yang timpang dan ketidakadilan dalam kesempatan ekonomi. Faktor seperti rendahnya upah, kebijakan yang tidak tepat sasaran, minimnya anggaran dan praktik korupsi turut memperparah kondisi ini (Dewi, Andriani, Widya, & Faricha, 2024).

### **Kebijakan Penanganan Ketimpangan**

Dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada antar kelompok masyarakat dan wilayah, maka dibentuklah beberapa kebijakan sebagai bentuk penanganan ketimpangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat atau menerapkan beberapa kebijakan utama yang memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mencapai pemerataan

ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan utama tersebut diantaranya sebagai berikut (Kumpanan, 2023) :

1. Program Bantuan Sosial
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyediaan Pendidikan Yang Berkualitas
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
5. Pengembangan UMKM
6. Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif analitik. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2006). Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa serta menjabarkan data dengan menarasikannya lewat kata-kata dari hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena ekonomi di Indonesia secara lebih mendalam dengan data dan literatur yang ada.

Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari dua sumber yaitu data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan ekonomi politik dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Serta, data primer berupa data dari arsip kebijakan atau data statistik resmi yang tersedia secara publik tanpa perlu melakukan wawancara. Setelah itu dilakukan analisis data dengan analisis konten dan naratif untuk mengkaji hubungan antara kebijakan ekonomi politik dengan hasil penanganan ketimpangan (Fadhilah, 2024).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Ekonomi Politik dalam Kebijakan Penanganan Ketimpangan**

Dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penanganan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, ekonomi politik mempunyai peran yang sangat penting. Dapat dilihat lembaga-lembaga politik yang ada seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang banyak memberikan kontribusi mereka dalam Menyusun strategi kebijakan yang bisa menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan yang terjadi di Indonesia dengan macam-macam program sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Peran ekonomi politik dalam penanganan ketimpangan diantaranya seperti kebijakan redistribusi pendapatan dirumuskan melalui langkah-langkah fiskal seperti pajak progresif

dan transfer sosial, yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan mengalihkan sumber daya kelompok kaya dan kurang mampu. Selain itu, pemerintah mendukung pemberdayaan ekonomi melalui kebijakan publik yang mengembangkan usaha kecil dan menengah, memberikan pelatihan, serta memfasilitasi akses pembiayaan. Hal ini bertujuan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kebijakan juga difokuskan pada penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan terjangkau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan, sehingga mengurangi ketimpangan sosial. Semua ini diatur oleh lembaga politik yang bertanggung jawab merencanakan, mengawasi, dan menjalankan kebijakan tersebut (Fadhilah, 2024).

### **Tantangan Implementasi**

Ketika kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dilaksanakan, beberapa tantangan masih dihadapi, oleh karena itu hingga saat ini penanganan ketimpangan belum dilakukan secara maksimal. Tantangan implementasi kebijakan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut (Unesa, 2023) :

1. Keterbatasan Sumber Daya
2. Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah
3. Kebijakan yang Kurang Tepat
4. Dinamika Politik Lokal dan Kepentingan Politik
5. Adanya Korupsi dan Kurangnya Transparansi
6. Data dan Mekanisme Distribusi yang Tidak Akurat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis ekonomi politik dalam penanganan ketimpangan perekonomian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan Gini Ratio, ketimpangan masih menjadi isu yang serius. Kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat telah dirancang, namun tantangan implementasi seperti pembatasan sumber daya, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk terus menganalisis dinamika politik dan ekonomi untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil dan merata, serta memastikan tidak adanya program-program yang ada lagi.

Saran yang dapat diberikan adalah, penanganan ketimpangan ekonomi di Indonesia memerlukan koordinasi antar lembaga, transparansi, dan optimalisasi sumber daya agar kebijakan yang diberikan benar-benar efektif. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi,

serta menekan praktik korupsi agar program-program tersebut mengurangi ketimpangan secara signifikan. Selain itu, analisis keberlanjutan terhadap dinamika politik dan ekonomi sangat penting untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Atiza, D. (2024, Juni 25). Dampak sosial ekonomi ketimpangan dalam masyarakat: Tinjauan mendalam. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/diaz-atisa/dampak-sosial-ekonomi-ketimpangan-dalam-masyarakat-tinjauan-mendalam-21rb7HJIF37/3>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2024. BPS.
- BPS. (2024, Juli 1). Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2024 (Berita Resmi Statistik No. 51/07/Th. XXVII). Badan Pusat Statistik (BPS).
- Dewi, F. P., Andriani, Widya, R. S., & Faricha, L. N. (2024). Problematika ketimpangan ekonomi dalam sistem. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 163–172. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.330>
- Fadhilah, S. (2024, November 25). Peran lembaga politik dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan ketimpangan sosial. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/siti-fadhilah-1731330388395257785/peran-lembaga-politik-dalam-merumuskan-dan-mengawasi-kebijakan-ketimpangan-sosia-23yaREyYEsC>
- Fai. (2024, September 7). Ekonomi politik dan sejarah perkembangannya. *Umsu.ac.id*. <https://umsu.ac.id/berita/ekonomi-politik-dan-sejarah-perkembangannya/>
- Gunung, E. B., Setiawan, D., & Yasin, M. (2023). Menganalisis penyebab, konsekuensi, dan solusi potret ketimpangan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(2), 329–339. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1688>
- Kumparan. (2023, Mei 17). 6 upaya mengatasi ketimpangan sosial yang digulirkan Indonesia. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-upaya-mengatasi-ketimpangan-sosial-yang-digulirkan-indonesia-20QI8VsZvsF/3>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W.W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development (13th ed.)*. Pearson Education.

Unesa, B. (2023, Juni 17). Ketimpangan sosial dan ekonomi: Meninjau kebijakan publik dalam upaya mengurangi kesenjangan berdasarkan Pancasila. Bem.fisipol.unesa.ac.id. <https://bem.fisipol.unesa.ac.id/post/ketimpangan-sosial-dan-ekonomi-meninjau-kebijakan-publik-dalam-upaya-mengurangi-kesenjangan-berdasarkan-pancasila>

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Human development report 2023: Breaking the inequality trap. UNDP.

World Bank. (2023). Indonesia economic prospects: Inclusive growth. World Bank Group.